

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI  
PADA PEMERINTAHAN DESA TAMBANG KECAMATAN  
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



**Oleh :**

**FADILATUS SHOLIKAH**

**NPM : 165310104**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Fadilatus Sholikhah  
NPM : 165310104  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa  
Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

(Alfurkaniati, SE., M.Si, Ak., CA)

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI

(Dr. Firdaus AR, M.Si., Ak., CA)



(Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA)






**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 674674  
Fax: (0761) 6748834 PEKANBARU - 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

1. Nama Mahasiswa : Fadilatus Sholikah
2. Npm : 165310104
3. Hari/ Tanggal : Selasa , 17 November 2020
4. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Sidang dibuka oleh Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempersilahkan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Dian Saputra, SE.,M.Acc.,Ak.CA.,ACPA  1. Membuat kata pengantar 2. Perbaiki penulisan bab 2 di daftar isi 3. Ubah berdasarkan standar PABU 4. Akibat dari nilai aset tahun sebelumnya bersaldo 0, tulis di pembahasan 5. Sesuaikan pembahasan dengan problem yang diangkat 6. Tanda kutip dihilangkan 7. Taksiran umur ekonomis aset tetap berdasarkan apa? 8. Contoh perhitungan akumulasi penyusutan, per tanggal ketika diperoleh (diasumsikan) 9. Perbaiki penulisan daftar pustaka	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat di halaman iii Terlihat di halaman vi Terlihat di halaman 5 & 31 Terlihat di halaman 47 Terlihat di halaman 43 Terlihat di halaman 4 Terlihat di halaman 44 Terlihat di halaman 45	  

2	<p>Yusrawati, SE.M.Si</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar yang digunakan PABU, perbaiki rumusan dan hipotesis</li> <li>2. Akibat tidak dibuatnya penyesuaian persediaan dan aset tetap terhadap laporan kekayaan milik desa</li> </ol>	<p>Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki</p>	<p>Terlihat dihalaman 5 &amp; 31</p> <p>Terlihat dihalaman 47 &amp; 48</p>	
---	--	--	--	---

Mengetahui,



**Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**  
Ketua Prodi Akuntansi S1

Disetujui,



**Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA**  
Pembimbing



## UNIVERSITAS ISLAM RIAU

### FAKULTAS EKONOMI


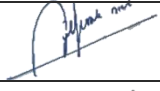

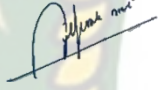
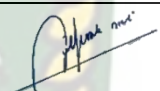
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

#### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fadilatus Sholikah  
NPM : 165310104  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Tambang  
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar  
Sponsor : Alfurkaniati, SE. M.Acc., Ak., CA., ACPA

Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut:

Tanggal	Catatan	Berita Acara	Paraf
	Sponsor		Sponsor
29/04/2020	X	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana daftar pustaka</li><li>2. LBM<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan masalah laporan kekayaan milik desa yang tidak menghitung nilai aset tahun sebelumnya</li><li>- Apakah ada daftar inventaris dia</li><li>- Apakah semua benar sudah dibayarkan PU 31/Des</li></ul></li></ol>	
13/05/2020	X	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah desa ada membuat daftar inventaris desa</li><li>2. Daftar pustaka minimal 14, teknis penulisan daftar pustaka</li><li>3. LBM format penyajian kekayaan milik desa sudah komparatif</li></ol>	
13/06/2020	X	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama aset yang disajikan untuk tahun sebelumnya Rp 0</li></ol>	

17/06/2020	X	1. Rencana daftar isi sampai bab V (format penulisan skripsi baru)	
20/06/2020	X	1. Acc seminar	
08/09/2020	X	1. Bab III 3.1 Desain penelitian 3.2 Objek penelitian 3.3 Jenis dan sumber data 3.1 Teknik pengumpulan data 2. Bab IV 4.1 Judul gambar sumber 4.2 Hasil penelitian 4.3 Pembahasan	
25/09/2020	X	1. Teknik penulisan 2. Abstrak 3. Daftar tabel 4. Dll	
02/10/2020	X	1. Acc seminar 2. Perhatikan dulu teknis daftar isi, tabel	

Pekanbaru, Desember 2020

Wakil Dekan I



  
**Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si**

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 1651/KPTS/FE-UIR/2020, Tanggal 15 November 2020, Maka pada Hari Selasa 17 November 2020 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2020/2021

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama                 | : Fadilatus Sholikhah   |
| 2. NPM                  | : 165310104   |
| 3. Program Studi        | : Akuntansi S1  |
| 4. Judul skripsi        | : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar. |
| 5. Tanggal ujian        | : 17 November 2020  |
| 6. Waktu ujian          | : 60 menit.   |
| 7. Tempat ujian         | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR   |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : <b>Lulus (A-) 76,75</b>   |
| 9. Keterangan lain      | : Aman dan lancar.  |

#### PANITIA UJIAN

Ketua



**Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si**  
Wakil Dekan Bidang Akademis

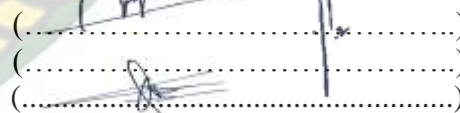
Sekretaris



**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**  
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA
2. Yusrawati, SE., M.Si
3. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA



Notulen

1. Irena Puspi Hastuti, SE., M.Si



Pekanbaru, 17 November 2020

Mengetahui  
Dekan,



**Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor: 1651 / Kpts/FE-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral komprehensif sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji  
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.  
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.  
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :  
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun  
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen  
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1  
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Fadilatus Sholikhah  
N P M : 165310104  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Yusrawati, SE., M.Si	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Dian Saputra, SE.,M.Acc.,Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Irena Puspi Hastuti, SE., M.Si	Non Fungsional C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 17 November 2020  
Dekan

*Firdaus AR*  
**Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA**

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



### BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Fadilatus Sholikhah  
NPM : 165310104  
Jurusan : Akuntansi / S1  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Tambang  
Kec. Tambang Kab. Kampar.  
Hari/Tanggal : Selasa 17 November 2020  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

#### Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA		

#### Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Yusrawati, SE., M.Si		
2	Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA		

#### Hasil Seminar : \*)

1. Lulus ( Total Nilai )
2. Lulus dengan perbaikan ( Total Nilai **77,5** )
3. Tidak Lulus ( Total Nilai )

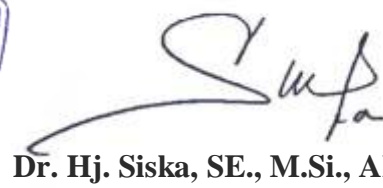
Mengetahui  
An.Dekan



**Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si**  
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 17 November 2020  
Ketua Prodi



**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**

\*) Coret yang tidak perlu

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

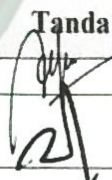
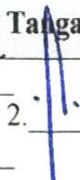

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Fadilatus Sholikhah  
NPM : 155310140  
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Tambang  
Kec. Tambang Kab. Kampar  
Pembimbing : I. Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA  
Hari/Tanggal Seminar : Kamis 16 Juli 2020

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui/ dirubah/ perlu diseminarkan \*)
2. Permasalahan : Jelas/ masih kabur/ perlu dirumuskan kembali \*)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/ mengambang/ perlu diperbaiki \*)
4. Hipotesa : Cukup tajam/ perlu dipertajam/ di perbaiki \*)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/ Kurang jelas \*)
6. Alat yang dipakai : Cocok/ belum cocok/ kurang \*)
7. Populasi dan sampel : Jelas/ tidak jelas \*)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/ tidak jelas \*)
9. Sumber data : Jelas/ tidak jelas \*)
10. Cara memperoleh data : Jelas/ tidak jelas \*)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/ tidak jelas \*)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/ belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian \*)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/ belum memenuhi syarat \*)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/ tidak perlu diseminarkan kembali \*)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Yusrawati, SE., M.Si	Anggota	2. 
3.	Erfan Effendi, SE., Ak., M.Tech	Anggota	3. 

\*Coret yang tidak perlu

Mengetahui  
An. Dekan Bidang Akademis

  
Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si.



Pekanbaru, 16 Juli 2020  
Sekretaris,

  
Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor: 359/Kpts/FE-UIR/2020**  
**TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1**  
*Bismillahirrohmanirrohim*  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Menimbang :1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.  
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003  
 2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005  
 3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012  
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014  
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :  
     a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangun  
     b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen  
     c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1  
     d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi  
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau  
     a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987  
     b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987  
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987  
     a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si, Ak, CA	Lektor, C/c	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:  
 N a m a : Fadilatus Sholikhah  
 N P M : 165310104  
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi / S1  
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas islam Riau.
4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
- Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru  
 Pada Tanggal: 05 Mei 2020  
 Dekan,



**Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA**

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS EKONOMI

### الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : FADILATUS SHOLIKAH  
NPM : 165310104  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA TAMBANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 27 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Desember 2020  
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Riau batal saya terima.

Pekanbaru, Desember 2020

Yang memberikan pernyataan,

(materai 6.000)

**Fadilatus Sholikhah**

NPM: 165310104

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA  
PEMERINTAHAN DESA TAMBANG KECAMATAN  
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**



Oleh :

**FADILATUS SHOLIKAH  
165310104**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa telah sesuai berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Tambang.

Desain Penelitian dalam penelitian ini berupa metode kualitatif karena penelitian ini berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, kemudian penelitian ini bersifat deskripsi yang didukung dengan teori-teori yang relevan. Data primer dan data sekunder ialah bentuk jenis dan sumber data di penelitian ini. Wawancara secara langsung dan dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

**Kata Kunci** : Akuntansi Desa, Pemerintahan Desa, Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

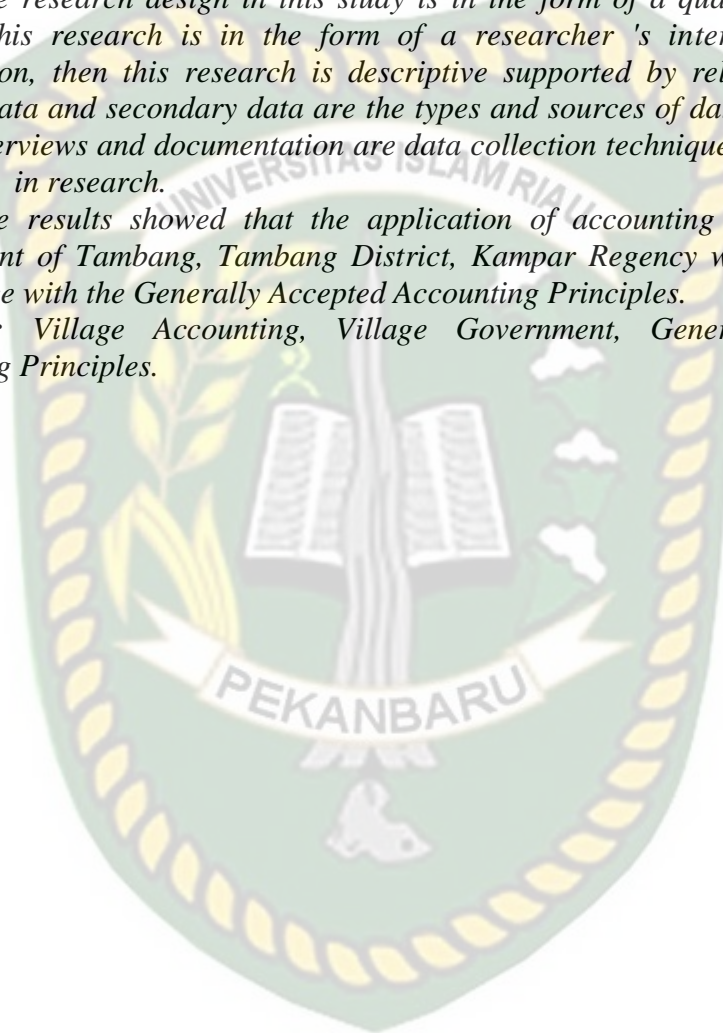
## **ABSTRACT**

*Research conducted by this writer aims to determine whether the application of accounting in the Village Government is appropriate based on the General Acceptable Accounting Principles. This research was conducted at the Head Office of Tambang Village, Tambang District, Tambang Regency.*

*The research design in this study is in the form of a qualitative method because this research is in the form of a researcher 's interpretation of a phenomenon, then this research is descriptive supported by relevant theories. Primary data and secondary data are the types and sources of data in this study. Direct interviews and documentation are data collection techniques conducted by the author in research.*

*The results showed that the application of accounting in the Village Government of Tambang, Tambang District, Kampar Regency was not fully in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles.*

**Keywords:** *Village Accounting, Village Government, Generally Accepted Accounting Principles.*



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.....

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, serta memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan terhadap penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1). Judul skripsi yang Penulis buat yaitu Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua Penulis **Bapak dan Ibu tercinta yaitu Bapak Sunarno dan Ibu Binti Rafi'atin**. Terimakasih untuk kasih dan sayang yang telah mendukung penulis. Memberikan pengorbanan materi serta do'a yang tak henti-hentinya kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan. Tidak ada upaya untuk membalas apa yang telah mereka berikan.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan serta do'a dari berbagai pihak baik secara langsung, maupun tidak langsung. Maka dari itu Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

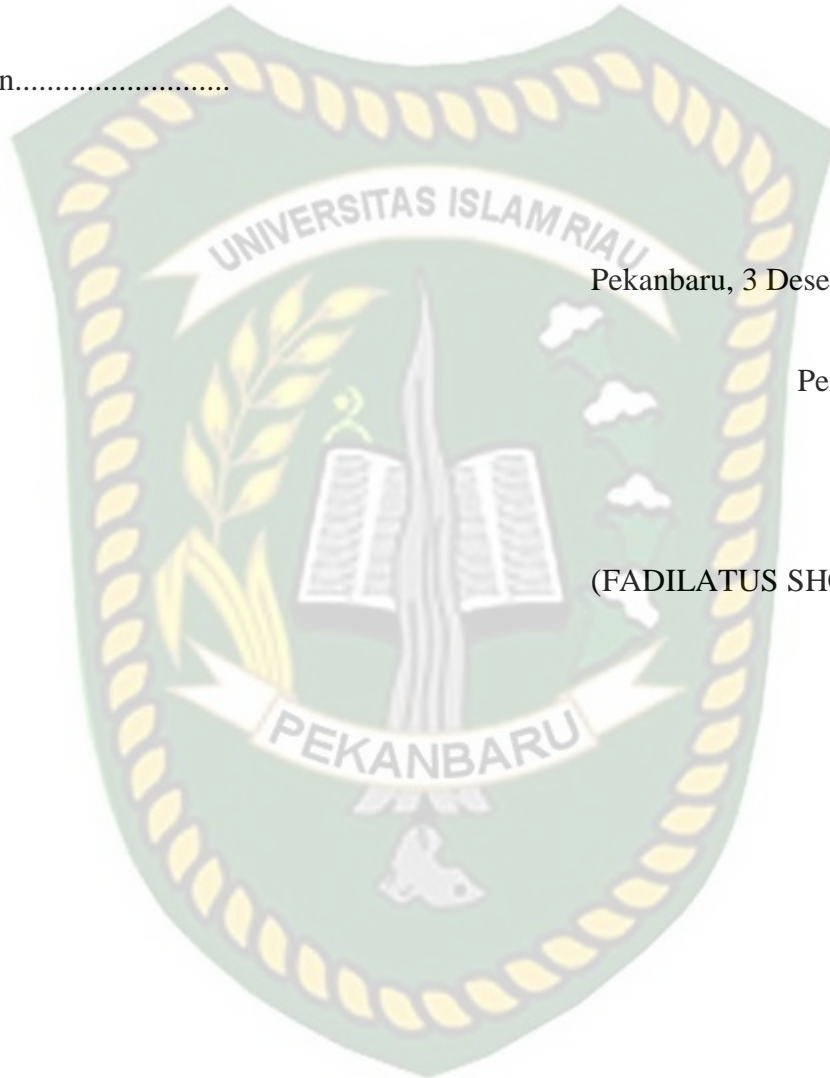
1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Drs. Abrar, M.Si., Ak., CA** selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah mengarahkan saya selama sama kuliah di Universitas Islam Riau.
4. Ibu **Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Bapak **Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak. CA., ACPA** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
6. Ibu **Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA** sebagai Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Membantu penulis dalam mengoreksi skripsi ini sehingga dapat menghasilkan sesuai apa yang diharapkan. Terima kasih Penulis ucapkan atas bimbingan yang telah diberikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengajaran dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Islam Riau.
8. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah ikut membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar di kampus.

9. Bapak Kepala Desa dan Bendahara Desa yang telah mengizinkan dan membantu Penulis dengan memberikan data dan keterangan yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
10. Untuk keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan serta do'a demi kelancaran penulisan skripsi ini dan dukungan untuk lebih maju lagi.
11. Untuk Sahabat Penulis sejak masa SMP, SMA dan sampai saat ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih karena sudah menemani, mendukung, dan memberikan semangat serta memberikan do'a terbaik sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2016 dan pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Terimakasih untuk bantuan dan dukungannya.

Banyak sekali tantangan dan halangan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata Sempurna. Untuk itu Penulis selalu terbuka dalam menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan diakhirat kelak. Memberikan limpahan kasih sayang dan anugerah kepada mereka yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Aamiin.....



Pekanbaru, 3 Desember 2020

Penulis

(FADILATUS SHOLIKAH)

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI .....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN .....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL .....	
SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TELAHAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>7</b>
2.1 Telaah Pustaka .....	7
2.1.1 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa .....	7
2.1.2 Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Desa .....	7
2.1.3 Prinsip-Prinsip Akuntansi .....	9
2.1.4 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi .....	9
2.1.5 Siklus Akuntansi .....	12
2.1.6 Pengertian Keuangan desa .....	12
2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa .....	12
2.1.8 Pencatatan pada Pengelolaan Keuangan Desa .....	12
2.1.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....	13
2.1.10 Penyusunan Laporan Keuangan .....	15
2.2 Hipotesis .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Desain Penelitian .....	32
3.2 Objek Penelitian .....	32
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.5 Teknik Analisis Data .....	33

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Pemerintahan Desa Tambang .....	34
4.2 Hasil Penelitian.....	38
4.3 Pembahasan .....	38
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>51</b>
5.1 Simpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Buku Kas umum- Tunai.....	39
Tabel IV.2 Buku Besar.....	42
Tabel IV.3 Buku Besar.....	42
Tabel IV.4 Buku Besar Pembantu.....	43
Tabel IV.5 Buku Besar Pembantu.....	43
Tabel IV.6 Aset Tetap Yang Harus Dilaporkan Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018.....	49
Tabel IV.7 Pemerintah Desa Tambang Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2018 .....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tambang Kecamatan  
Tambang Kabupaten Kampar .....37



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018 dan Tahun 2017
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesan Tahun 2018 dan Tahun 2017
- Lampiran 3 : Buku Bank Desa Tahun 2018 dan Tahun 2017
- Lampiran 4 : Buku Kas Pembantu Kegiatan Tahun 2018 dan Tahun 2017
- Lampiran 5 : Buku Kas Pembantu Pajak Tahun 2018 dan Tahun 2017
- Lampiran 6 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 dan Tahun 2017
- Lampiran 7 : Buku Kas Umum Tunai Tahun 2018 dan Tahun 2017
- Lampiran 8 : Buku Inventaris Tahun 2018 dan Tahun 2017

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan keutuhan masyarakat hukum adat desa yang mempunyai lembaga ekonomi, politik, sosial budaya, lembaga peradilan serta keamanan. Yang dikelola sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahir & bathin. Untuk menunjang keberlangsungan hidup atas keutuhan masyarakat hukum, maka desa memiliki kekayaan serta potensi yang diatur berdasarkan sistem lembaga yang dikembangkan serta dikendalikan sendiri oleh masyarakat desa.

Tahun 2010 Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai ganti atas PP Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan ialah panduan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan dipemerintahan, bagi pemerintah daerah dan pusat.

Berlakunya SAP maka dapat terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik serta mampu mengelola tugas pemerintahannya selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, keterbukaan, dan kewajaran.

Desa yakni bentuk pemerintahan yang paling kecil dipimpin oleh Kepala Desa. Selama menjalankan tugas di pemerintahan desa, Kepala Desa didukung oleh staf-staf desanya yang menjalankan tugasnya sesuai pada porsi jabatannya. Pemerintah berupaya mengatur, mengurus kegiatan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sekitar tentu memerlukan pemasukan supaya tercapainya tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Desa diharapkan mampu melaksanakan pelayanan administratif dengan benar dan bisa mengelola keuangannya dengan tertib sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP 2015. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ialah bentuk kegiatan dari pengelolaan keuangan desa.

Akuntansi Desa yakni proses mencatat transaksi yang timbul di desa dengan bukti notanya, setelah proses mencatat serta pelaporan keuangan dilakukan, laporan keuangan yang berisi sumber informasi akan dihasilkan.

Dengan lahirnya Permendagri No. 113 Tahun 2014, maka dibuat Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa yaitu IAI-KASP 2015. Menurut IAI-KASP ada empat tahap siklus akuntansi yaitu : Pertama yaitu dari bukti transaksi lalu mencatat ke buku harian atau jurnal umum. Kedua yaitu penggolongan yakni tahap penggolongan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang selesai dicatat dan dinilai dikolom debit dan kredit. Ketiga yaitu tahap pengikhtisaran, kertas kerja dan neraca saldo dibuat ditahap ini. Laporan Kekayaan Milik Desa akan mencakup saldo akhir akun-akun yang sudah dicatat pada buku besar utama

dan buku besar pembantu. Tahap ke empat yaitu pelaporan yakni tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilaksanakan ialah menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan kekayaan milik desa.

Dasar pencatatan akuntansi di Desa Tambang berbasis kas. Basis ini ialah mengakui pendapatan dan belanja serta pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

Sejak tahun 2016 Desa Tambang Kecamatan Tambang telah menggunakan Siskeudes yang berupa aplikasi yang dibuat oleh BPKP yang berguna sebagai menambah kualitas pengelolaan keuangan desa. Proses akuntansi yang dilakukan Desa Tambang Kecamatan Tambang adalah membuat penganggaran yang disusun dalam penyusunan anggaran yaitu APBDes (Lampiran 6) dalam proses anggaran timbul transaksi. Transaksi lalu dicatat ke Buku Kas Umum (Lampiran 7). Buku Kas Umum ialah buku yang berfungsi sebagai catatan atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik tunai serta kredit. Untuk pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan uang bank, desa mencatat Buku Bank Desa (Lampiran 3). Buku Kas Pembantu Kegiatan diaplikasikan agar dapat membantu desa atas hal keuangan desa untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan yang bisa mempengaruhi keuangan atau saldo kas pada desa (Lampiran 4). Sementara Buku Kas Pembantu Pajak berguna dalam membantu buku kas umum untuk mencatat pemasukan serta pengeluaran berkaitan tentang pajak (Lampiran 5). Setelah semua pencatatan dibuat dengan jelas dan

utuh kemudian Desa Tambang menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Lampiran 2) serta Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1).

Permasalahan yang terjadi pada proses akuntansi di Desa Tambang yaitu format penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa di Desa Tambang sudah komparatif, namun nilai aset tahun sebelumnya berjumlah Rp. 0. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 dan 2017 bagian persediaan berjumlah Rp. 0 karena Desa Tambang Kecamatan Tambang tidak menyajikan nilai persediaan di akhir periode. Pada tahun 2018 di laporan kekayaan milik desa, Desa Tambang memiliki aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung serta bangunan, jalan dan jaringan instalasi, tetapi bendahara Desa Tambang tidak mengakumulasi nilai aset tetap yang dimiliki desa pada tahun sebelumnya di laporan kekayaan milik desa tahun berjalan serta tidak menghitung dan menyajikan nilai akumulasi penyusutan aset tetap dalam laporan kekayaan milik desa tahun berjalan.

Mengarah pada penjabaran tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA TAMBANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai uraian latar belakang masalah sebelumnya, perumusan masalah yang penulis buat yaitu :

Apakah penerapan akuntansi yang diterapkan Pada Pemerintahan Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah sesuai berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dan menganalisis apakah penerapan akuntansi yang diterapkan di Pemerintahan Desa Tambang sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian teruntuk peneliti yaitu untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai akuntansi desa.
- b. Penelitian teruntuk Desa Tambang yaitu sebagai bahan kajian kebijakan dalam mengambil keputusan yang baik untuk penerapan penyusunan laporan keuangan desa dan dapat sebagai contoh untuk desa yang lain.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi panduan untuk menyelesaikan skripsi dengan tema yang menyerupai.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Berikut dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu :

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Diuraikan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**  
Menjabarkan pteorian yang berhubungan pada masalah yang jadi pembahasan.
- BAB III : METODE PENELITIAN**  
Metode penelitian yang isinya desain serta objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
Berhubungan dengan gambaran desa, kemudian mengutarakan hasil penelitian serta pembahasan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian itu.
- BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**  
Beirisikan simpulan dan saran dari penelitian ini.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Telaah Pustaka

##### 2.1.1 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

Desa adalah wilayah penduduk dimana masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat setempat, sifat sosialnya masih tinggi dan hubungan antara masyarakatnya sangat erat.

Menurut Rosalinda (2014) Desa sebagai bagian atas sistem pemerintahan NKRI yang diakui otonominya oleh kepala desa lewat pemerintah desa bisa diberi tugas pendelegasian atas pemerintahan atau pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah tersebut. Landasan berpikir mengenai aturan tentang desa merupakan demokratisasi, keanekaragaman, otonomi asli, partisipasi, serta pemberdayaan masyarakat.

Menurut PP No. 72 Tahun 2005 Pemerintahan desa ialah penyelenggara persoalan pemerintahan dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk mengelola serta mengontrol kepentingan masyarakat yang diakui serta dihormati disistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### 2.1.2 Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Desa

Akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.

Menurut Kieso, *et al.* (2010) pada buku Dwi Martani, dkk (2012:4) memberikan definisi akuntansi merupakan :

Akuntansi selaku sistem atas input data atau informasi output berupa informasi atas laporan keuangan yang berguna oleh pihak dalam / pihak luar entitas. Sesuai sistem akuntansi terdiri atas input yaitu transaksi, proses yaitu kegiatan untuk meringkas transaksi, serta output yakni laporan keuangan.

L.M Samryn (2011:3) Akuntansi yakni sistem informasi yang berguna sebagai pengolah data dimulai dari transaksi jadi informasi keuangan.

Menurut Sadeli (2015:2) menegaskan akuntansi berfungsi untuk pencatatan, peringkasan, pelaporan, penginterpretasian data dasar ekonomi untuuk keperluan pengusaha, pemerintah, perorangan serta anggota masyarakat lain.

Carl S. Warren, (2014:3) Akuntansi merupakan sebuah sistem yang menyediakan informasi untuk semua pihak mengenai aktifitas *economy* dan kondisi perusahaan.

Carl S. Warren, Reeve, dan Duchac (2011:3) akuntansi ialah sistem informasi yang menyediakan laporan bagi pengguna atas aktifitas ekonomi serta kondisi sebuah bisnis.

Wiratna (2015 : 17) Akuntansi Desa yakni proses menulis transaksi yang timbul didesa dengan bukti notanya, setelah proses mencatat serta pelaporan keuangan dilakukan, laporan keuangan yang berisi sumber informasi akan dihasilkan.

### 2.1.3 Prinsip-Prinsip Akuntansi

Dapat disebut juga sebagai sebuah nilai yang menjadi acuan serta panduan standar akuntansi mengikuti prinsip akuntansi saat menyusun laporan keuangan, bisa mempermudah kelompok pembuat serta kelompok eksternal supaya memahami serta mencocokkan sesuai laporan keuangan pemerintah Desa lainnya.

IAI KASP 2015 berpandangan bahwa terdapat beberapa penjelasan mengenai prinsip akuntansi seperti :

1. Prinsip Realisasi Pendapatan
2. Prinsip Harga Perolehan
3. Prinsip Objektif
4. Prinsip Pengungkapan Penuh
5. Prinsip Konsistensi

### 2.1.4 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

#### a. Sistem Pencatatan Akuntansi

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:45-51) sistem mencatat didalam akuntansi terbagi menjadi tiga macam , yaitu :

1. *Single Entry*  
Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tatat buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada isi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.
2. *Double Entry*  
Adalah sistem pencatatan dimana transaksi ekonomi dicatat dua kali. Oleh karena itu, pada sistem pencatatan *double entry* terbagi dua sisi yaitu debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Setiap pencatatan transaksi harus

menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi tersebut terbentuk sebagai berikut :

$$\text{ASET} + \text{BEBAN} = \text{UTANG} + \text{EKUITAS} + \text{PENDAPATAN}$$

3. *Triple Entry*

Adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.

**b. Dasar Pengakuan Akuntansi**

Tujuan utama dari pengakuan adalah untuk penentuan kapan transaksi tersebut tercatat dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai bentuk aturan atau basis dasar akuntansi.

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:46-51) mengenai basis akuntansi :

1. Basis Kas (*Cash Basic*)

Basis kas, seperti telah diuraikan sebelumnya menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, apabila suatu transaksi bukan menimbulkan perubahan kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2. Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa itu terjadi bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode terjadinya.

3. Basis Kas Modifikasian (*Modified Cash Basis*)

Basis kas modifikasian mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis Akrua Modifikasian (*Modified Accrual Basis*)

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual di landasi oleh pertimbangan kepraktisan.

### 2.1.5 Siklus Akuntansi

Ialah gambaran tahapan aktivitas akuntansi diantaranya : melakukan tahapan pencatatan, menggolongkan, mengikhtisarkan pelaporan dimulai saat terjadi transaksi. IAI KASP 2015 mengenai tahapan siklus akuntansi :

1. Tahap Pencatatan

Ialah bagian pertama siklus akuntansi. Yang bermula pada bukti transaksi kemudian mencatatnya ke buku harian atau jurnal umum.

2. Tahap Penggolongan

ialah pencatatan atas bukti transaksi di buku besar selaras dengan nama-nama akun beserta saldonya. dan sudah dicatat kedalam kolom debet & kredit.

3. Tahap Pengikhtisaran

Di bab ini terdapat penyusunan neraca saldo dan kertas kerja.

4. Tahap Pelaporan

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Yang isinya yaitu besarnya realisasi anggaran atas belanja, pendapatan, serta biaya oleh pemerintah desa yng berkaitan dengan tahun anggaran tertentu.

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Berisi laporan mengenai letak aset lancar, aset tak lancar, serta kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu

### **2.1.6 Pengertian Keuangan desa**

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni pasal 72 ayat 1 mengatakan keuangan desa merupakan segala milik serta tanggung jawab desa dan bisa diperhitungkan menggunakan uang maupun barang berkaitan atas dilaksanakannya milik (hak) dan tanggung jawab desa..

### **2.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa**

Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa mengelolanya atas asas transparansi, akuntabel partisipatif, beserta dilaksanakan secara tertib maupun patuh atas anggaran. Tata kelola keuangan desa dilakukan pada satu periode anggaran yaitu dimulai tanggal 1 januari hingga tanggal 31 desember. Pengelolaan tidak lepas dari kepala desa dan perangkat desa lain.

### **2.1.8 Pencatatan pada Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **1. Mencatat Transaksi Pendapatan**

Dilaksanakan pencatatan berupa :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- b. Transfer
- c. Pendapatan Lain-lain

#### **2. Mencatat Transaksi Belanja**

#### **3. Pencatatan Transaksi Pembiayaan**

Dilaksanakan pencatatan berupa :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

#### 4. Pencatatan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih Pemerintah Desa

### 2.1.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pandangan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Sektor Publik (IAI KASP) 2015, APBDes berupa :

#### 1. Pendapatan Desa

Ialah seluruh uang yang diterima melalui rekening desa dalam satu periode.

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes)
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa (ADD)
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.
- f. Hibah
- g. Sumbangan Pihak Ketiga

#### 2. Belanja Desa

Ialah seluruh uang yang dikeluarkan dari rekening desa berupa kewajiban desa disatu periode anggaran dan tidak diterima pembayarannya lagi oleh desa.

Belanja Desa terdiri dari :

- a. Belanja langsung terdiri dari :
  1. Belanja Pegawai ;

2. Belanja Barang dan Jasa ; dan
  3. Belanja Modal
- b. Belanja Tidak Langsung terdiri dari :
1. Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap
  2. Belanja Subsidi
  3. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
  4. Belanja Bantuan Sosial
  5. Belanja Bantuan Keuangan
  6. Belanja Tak Terduga

3. Pembiayaan Desa

Ialah seluruh uang yang diterima semestinya ditukar lagi atau biaya yang diperoleh lagi, baik tahun anggaran yang sama ataupun tahun anggaran setelahnya. Pembiayaan desa terdiri atas :

1. Penerimaan pembiayaan mencakup :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
  - b. Pencairan Dana Cadangan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
  - d. Penerimaan Pinjaman
2. Pengeluaran Pembiayaan mencakup :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan
  - b. Penyertaan Modal Desa
  - c. Pembayaran Utang

### 2.1.10 Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Menyusun laporan keuangan ialah siklus akuntansi bagian terakhir.

Laporan keuangannya yaitu :

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Terdiri atas realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan oleh Pemerintahan desa berbeda dari anggaran yang sama.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Terdiri dari kekayaan milik desa mengenai selisih antara aset yang dimiliki desa dengan total kewajiban desa hingga tanggal 31 Desember suatu tahun.

Menurut Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati (2012:201) mengatakan bahwa persediaan di entitas pemerintah berupa :

1. Barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan (*supplies*), misalnya barang habis pakai seperti ATK, bahan pembersih (*toiletries*), dan barang tak habis pakai, seperti lampu, gunting, stapler, dan lain-lain.
2. Barang yang digunakan dalam proses produksi, seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku untuk pembuatan KTP, dan sebagainya.
3. Barang hasil proses produksi yang belum selesai, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contohnya karcis parkir dan bibit tanaman.
5. Barang yang disimpan untuk tujuan cadangan strategis, seperti cadangan energi (misalnya minyak), atau untuk tujuan berjaga-jaga, seperti cadangan pangan (misalnya beras).

Menurut PSAP 05 Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum

selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat terdiri dari:

1. Barang konsumsi;
2. Amunisi;
3. Bahan untuk pemeliharaan;
4. Suku cadang;
5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6. Pita cukai dan leges;
7. Bahan baku;
8. Barang dalam proses/setengah jadi;
9. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

#### **A. Pengakuan**

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

#### **B. Pengukuran**

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:

1. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang
2. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

### **C. Beban Persediaan**

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

#### D. Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Menurut Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati (2012:229) mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Menurut PSAP 07 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **A. Pengakuan Aset Tetap**

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang

diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

### **B. Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

### C. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti tersebut di atas. Penilaian kembali aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

**a) Komponen Biaya**

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. biaya persiapan tempat;
2. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
3. biaya pemasangan (*installation cost*);
4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
5. biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang

terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara

langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

**b) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

**c) Perolehan Secara Gabungan**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

**d) Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan

jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### e) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh

satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### **D. Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,

penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat digunakan yaitu :

1. Metode garis lurus (*straight line method*); atau
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
3. Metode unit produksi (*unit of production method*).

#### **E. Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)**

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **F. Pengungkapan**

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a) Penambahan;
  - b) Pelepasan;

- c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
- a) Nilai penyusutan;
  - b) Metode penyusutan yang digunakan;
  - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;
3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

## 2.2 Hipotesis

Sesuai penjabaran pada bab 1 dan bab 2 muncul sebuah hipotesis yakni Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penulis memakai metode kualitatif karena penelitian berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, kemudian penelitian ini bersifat deskripsi yang di dukung dengan teori-teori yang relevan.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian di Kantor Kepala Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer

Hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait inilah yang dimaksud dengan data primer.

2. Data Sekunder

Data yang didapatkan berupa laporan keuangan, struktur organisasi, sejarah singkat Desa Tambang.

#### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara langsung dengan pihak bersangkutan seperti Kepala Urusan Keuangan dan bendaharawan Pada Kantor Kepala Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Dokumentasi ialah dilakukan dengan teknik mengumpulkan data dan informasi dengan cara menganalisa beberapa dokumen yang diperoleh dari bagian keuangan.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis yang dilakukan penulis ialah metode deskriptif dengan membandingkan praktek dengan teori yang relevan, sehingga ditarik simpulan untuk disajikan didalam skripsi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Pemerintahan Desa Tambang

Desa Tambang adalah Desa Tertua di Kecamatan Tambang yang mana Desa Tambang pada mulanya adalah berasal dari Kanagarian Tambang yang wilayahnya cukup luas dan masuk kedalam Kecamatan Kampar. Tahun 1980 Kepala Desa dipimpin oleh Bukhari. Di tahun 1989/1990 diselenggarakannya pemilihan Kepala Desa sehingga terpilih sebagai Kepala Desa yaitu Abdul Munaf sampai dengan tahun 2000, yang selanjutnya dijabat oleh Yusri Hs (2000-2005). Tahun 2005 diganti dengan Kariman dengan carik/sekdes Anwar Agus sampai dengan tahun 2008. 2009-2013 Desa Tambang dijabat oleh Yusri Hs dengan carik/sekdes Kariman tahun (2013-2015). Tahun 2016-2017 Desa Tambang dijabat oleh Afrianto S.Pd dengan carik sekdes Kariman, lalu Desa Tambang dipimpin oleh Kepala Desa tahun 2018-sekarang Al Kautsar S.Stp dan Kariman sebagai Sekdes.

##### 1. Demografi

###### a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Tambang, terletak diantara :

Sebelah utara : Desa Balam Jaya

Sebelah Selatan : Dengan Sungai Kampar

Sebelah Barat : Desa Kuapan

Sebelah Timur : Desa Pulau Permai

b) Luas wilayah Desa

1. Pemukiman : 44,7 ha
2. Pertanian Sawah : 17,5 ha
3. Ladang/Tegalan : ..... ha
4. Hutan : ..... ha
5. Rawa-rawa : ..... ha
6. Perkantoran : 0,05 ha
7. Sekolah : 0,75 ha

c) Total penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala keluarga : 1171 KK
2. Laki – laki : 2073 Orang
3. Perempuan : 1513 Orang

**2. Kondisi Pemerintahan Desa**

a) Lembaga Pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 5 orang
4. BPD : 9 orang

b) Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan :

1. LPM : 1

- |                  |      |          |
|------------------|------|----------|
| 2. PKK           | : 1  |          |
| 3. Posyandu      | : 4  |          |
| 4. Pengajian     | : 10 | kelompok |
| 5. Arisan        | : 0  | kelompok |
| 6. Simpan pinjam | : 3  | kelompok |
| 7. Kelompok tani | : 7  | kelompok |
| 8. Gapoktan      | : 0  | kelompok |
| 9. Karang Taruna | : 0  | kelompok |
| 10. Risma        | : 0  | kelompok |
| 11. Ormas/LSM    | : 0  | kelompok |
| 12. Lain-lain    | : 0  | kelompok |

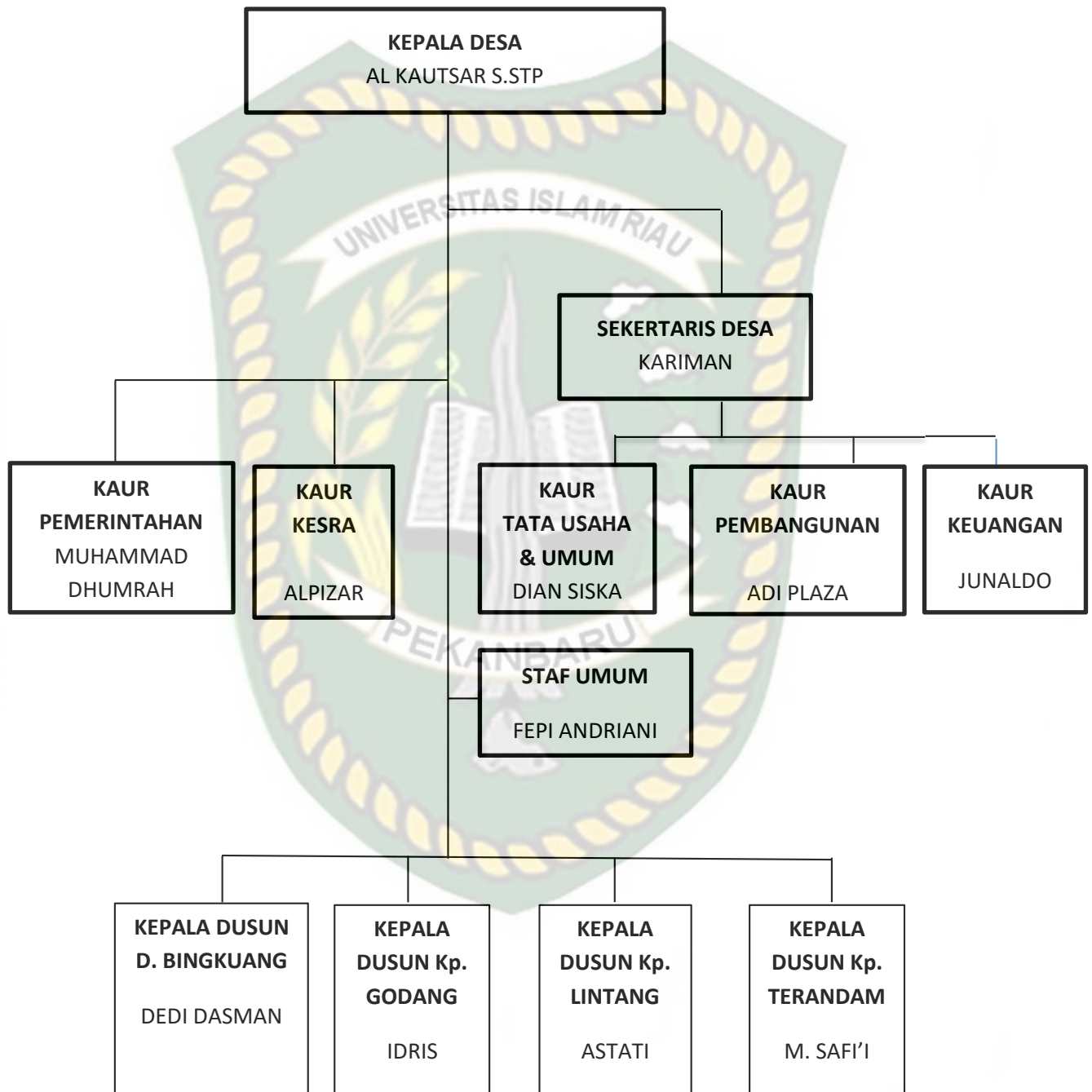
c) Pembagian wilayah

Nama Dusun :

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Dusun Pasar D. Bingkuang | : Jumlah 2 RW 4 RT |
| 2. Dusun Kampung Godang     | : Jumlah 2 RW 4 RT |
| 3. Dusun Kampung Lintang    | : Jumlah 2 RW 4 RT |
| 4. Dusun Kampung Terandam   | : Jumlah 2 RW 4 RT |

**3. Struktur Organisasi Desa**

**Gambar IV.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TAMBANG**  
**KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**



Sumber : Desa Tambang

## 4.2 Hasil Penelitian

Berikut dijabarkan hasil penelitian pada Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Berlandaskan data yang didapat dari Desa Tambang tersebut serta permasalahan yang diuraikan di latar belakang dan didukung dengan teori-teori yang relevan seperti yang telah di jabarkan dibab II telaah pustaka. Kemudian penulis akan menganalisa bagaimana akuntansi yang diterapkan pada Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

## 4.3 Pembahasan

### 4.3.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi pada Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Desa Tambang memakai sistem catatan *single entry* yaitu sistem tata buku tunggal yang mencatat transaksi nya hanya sekali. Transaksi yang memberikan efek menambah kas ditulis diposisi penerimaan dan transaksi yang berefek mengurangi kas ditulis diposisi pengeluaran. Desa Tambang menggunakan dasar pengakuan akuntansi *cash basic* yaitu pengakuan transaksi ekonomi hanya dilakukan bila transaksi itu berakibat dikas, transaksi tidak dicatat bila tidak berakibat merubah kas.

### 4.3.2 Tahap Siklus Akuntansi Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

## 1. Tahap Pencatatan

Tahap pencatatan Desa Tambang dimulai dengan bukti transaksi kemudian dicatat dibuku yang cocok yakni buku kas umum- tunai, buku bank desa, buku kas pembantu kegiatan dan buku kas pembantu pajak.

Sumber pendapatan Desa Tambang diperoleh dari PADesa serta Pendapatan Transfer berupa dana desa, bagi hasil pajak, retribusi, alokasi dana desa serta bantuan uang provinsi. Sedangkan untuk pengeluaran desa berupa belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja pegawai.

### A. Buku Kas Umum – Tunai

Adalah buku yang diaplikasikan untuk pencatatan semua kegiatan yang bersangkutan dengan pemasukan serta pengeluaran kas secara tunai atau kredit. Pada Desa Tambang segala transaksi baik pemasukan dan pengeluaran dicatat pada buku kas umum. Buku Kas Umum pada Desa Tambang telah dibuat sesuai Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1**  
**Buku kas umum – Tunai**  
**Pemerintah Desa Tambang**  
**Tahun Anggaran 2018**

<b>No</b>	<b>Tgl</b>	<b>Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Penerimaan (Rp)</b>	<b>Pengeluaran (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	02/05/2018		Tunai Kas di bendahara	64.050.000	0
2	02/05/2018		Penghasilan tetap kades dan perangkat ( januari s/d maret	0	32.250.000

		2018) Kas dibendahara		
3	02/05/2018	Tunjangan BPD dan Anggota Kas dibendahara	0	13.800.000
4	02/05/2018	Insentif RT/RW Kas Dibendahara	0	18.000.000

#### B. Buku Bank Desa

Adalah buku yang berfungsi untuk membantu Buku Kas Umum, yang bersangkutan terhadap pemasukan dan pengeluaran uang bank. Desa Tambang telah menyusun buku bank desa yang sama dengan format Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dapat dilihat pada lampiran 3.

#### C. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Adalah buku yang menyajikan informasi tentang pemasukan serta pengeluaran sesuai dengan jenis dan bidang kegiatan yang diselenggarakan disertai penyajian dari jumlah yang diterima dan dikeluarkan sesuai bidang kegiatan.

Buku kas pembantu kegiatan yang disusun Desa Tambang sesuai dengan Pedoman Asistensi Keuangan Desa dapat dilihat pada lampiran 4.

#### D. Buku Kas Pembantu Pajak

Yaitu buku yang berfungsi sebagai catatan transaksi pungutan maupun potongan pajak dari belanja yang dilaksanakan oleh desa yang udah menyajikan total saldo kumulatif pajak yang masih disetorkan.

Desa tambang telah menyusun buku kas pembantu pajak yang sama dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Penyajian buku kas pembantu pajak yang dibuat Desa Tambang dapat dilihat pada lampiran 5.

## **2. Tahap Penggolongan**

Berisi buku besar dan buku pembantu yang memiliki fungsi yakni untuk menggolongkan segala akun transaksi ke dalam satu akun yang sama, Desa Tambang tidak mencatat buku besar. Akibat tidak membuatnya buku besar yaitu saldo masing-masing akun tidak terhitung selama tahun berjalan sehingga desa tambang akan kesulitan dalam mengetahui saldo akhir dari transaksinya masing-masing, juga akan kesulitan dalam penyusunan neraca saldo. Disebutkan juga tahap yang dilakukan oleh Desa Tambang ini belum sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

Sebaiknya Desa Tambang menyusun buku besar sebagai pencatatan seluruh transaksi terkait masing-masing akun lalu mengakumulasikan total saldo per masing-masing akunnnya, agar Desa Tambang mudah untuk mengetahui total saldo dimasing-masing transaksi.

Dibawah adalah bentuk buku besar dan buku besar pembantu yang sebaiknya dibuat Desa Tambang :

**Tabel IV.2  
BUKU BESAR**

Akun : kas di dibendahara

No. Akun : 1112

TGL	KET	RE F	D	K	SALDO	
					D	K
02/05/20 18	Penerimaan dana desa tranfer		64.050. 000	0	64.050. 000	
02/05/20 18	Belanja Pegawai			32.250. 000		32.250. 000
02/05/20 18	Belanja Pegawai			13.800. 000		13.800. 000
02/05/20 18	Belanja pegawai			18.000. 000		18.000. 000

**Tabel IV.3  
BUKU BESAR**

Akun : pendapatan transfer

No.Akun : 4200

Tgl	Ket	Ref	D	K	SALDO	
					D	K
27/04/2018	Penerimaan dana desa		64.050.000	0	64.050.000	

**Tabel IV.4**  
**BUKU BESAR PEMBANTU**

Akun : Dana desa

No.Akun : 4210

Tgl	Ket	Ref	D	K	SALDO	
					D	K
02/05/2018	Transfer Dana desa thp 1		64.050.000	0	64.050.000	

**Tabel IV.5**  
**BUKU BESAR PEMBANTU**

Akun : Belanja Pegawai

No.Akun : 5111

TGL	KET	REF	D	K	SALDO	
					D	K
02/05/2018	Penghasilan tetap kades dan perangkat			32.250.000		32.250.000
02/05/2018	Tunjangan BPD dan Anggota			13.800.000		13.800.000
02/05/2018	Insentif RT/RW					18.000.000

### 3. Tahap Pengikhtisaran

Desa Tambang tidak menyusun neraca saldo serta kertas kerja. Sehingga mengakibatkan tidak teridentifikasinya kekeliruan dalam pencatatan atas saldo akun di awal sebelum disusunnya laporan keuangan. Akhirnya saldo akun yang disusun dalam laporan keuangan tidak selaras dengan keadaan yang sesungguhnya.

Sebaiknya Desa Tambang menyusun neraca saldo. Neraca saldo dan kertas kerja memiliki peran untuk meminimalisir salah saat mencatat saldo akun sebelum laporan keuangan disusun.

Dalam tahap pengikhtisaran ini Desa Tambang tidak melakukan perhitungan penyesuaian atas persediaan serta aset tetap desa. Penyesuaian berfungsi untuk menyajikan nilai yang sebenarnya dari aset yang dimiliki desa di akhir periode. Konsekuensi dari tidak dibuatnya penyesuaian terhadap aset yang dimiliki desa adalah nilai aset dan ekuitas yang disajikan pada laporan keuangan menjadi lebih tinggi dari nilai yang seharusnya.

Dibawah ini beberapa transaksi yang perlu dibuat jurnal penyesuaian :

a) Bahan Habis pakai

Adalah aset yang digunakan untuk dipakai dalam aktivitas operasional yang entitasnya bersifat habis pakai, yang dipakai satu kali ataupun diperiode jangka pendek. Bahan habis pakai ialah aset lancar yang dimiliki oleh desa dengan manfaat yang kurang dari satu tahun yang mana harus dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Salah satu bahan habis pakai yang perlu dilakukan penyesuaian yaitu ATK.

Desa Tambang tidak membuat penyesuaian terhadap persediaan Alat Tulis Kantor (ATK). dan Desa Tambang juga tidak menyajikan nilai persediaan di akhir periode, dampaknya terhadap laporan kekayaan milik desa yaitu nilai persediaan sebesar Rp.0. Nilai pembelian ATK tahun 2018 sebesar Rp. 8.726.390 dan alat tulis kantor itu telah habis terpakai untuk satu tahun. Maka *adjustmentnya* yaitu :

Beban bahan habis pakai 8.726.390

Bahan habis pakai 8.726.390

b) Aset Tetap

Tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan serta jaringan ialah macam macam aset tetap yang dimiliki desa tambang. Didalam laporan kekayaan milik desa, aset tetap tidak dihitung penyusutannya diakhir tahun.

Efek penyusutan yang tidak dihitung pada aset yang dipunyai oleh desa bisa menimbulkan jumlah nilai aset yang dimiliki oleh desa tinggi dari jumlah seharusnya nilai aset diakhir tahun berjalan dilaporan kekayaan milik desa.

Seharusnya penyusutan aset tetap dihitung oleh desa sehingga pada laporan kekayaan milik desa total nilai aset sama besarnya dengan nilai aset yang seharusnya di akhir tahun.

Metode yang dipakai untuk menilai masa pemakaian dari suatu aset disebut metode penyusutan garis lurus. Gedung dan bangunan ditaksir dengan umur ekonomis 10 tahun, peralatan & mesin 5 tahun, jalan & jaringan yaitu 20 tahun. Taksiran umur ekonomis yang digunakan ialah menurut aturan Undang – Undang perpajakan. Daftar aset milik desa tambang ditahun 2018 adalah sebagai berikut:

AT	HP
Peralatan & Mesin	Rp. 71.338.536
Gedung dan Bangunan	Rp. 69.098.550
Jalan dan Jaringan	Rp. 352.806.300

Dibawah ini adalah bentuk penyesuaian Aset Tetap yang sebenarnya dilakukan Desa Tambang :

*Adjustment* per 31/12/ 2018 :

1. Penyusutan Peralatan dan Mesin

Diasumsikan pembelian peralatan kantor berupa 2 unit laptop pada tanggal 5 maret 2018 dengan harga perolehan sebesar Rp10.280.000.

$$\text{Penyusutan/tahun} = \frac{\text{Rp}10.280.000}{5} = \text{Rp}2.056.000$$

$$\text{Penyusutan/bln} = \frac{\text{Rp}2.056.000}{12} = \text{Rp}171.333,33$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi penyusutan laptop th 2018} &= \text{Rp}171.333,33 \times 10 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp}1.713.333,3 \end{aligned}$$

*Adjustment* :

Beban penyusutan peralatan dan mesin                      Rp1.713.333,3

    Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin                      Rp1.713.333,3

2. Penyusutan Gedung dan Bangunan

Diasumsikan 8 januari 2018 dibangun sebuah bangunan berupa rumah sehat fakir miskin (megawati) dengan harga perolehan sebesar Rp46.736.550

$$\text{Penyusutan/tahun} = \frac{\text{Rp}46.736.550}{10} = \text{Rp}4.673.055$$

$$\text{Penyusutan/bln} = \frac{\text{Rp}4.673.055}{12} = \text{Rp}389.421,25$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi penyusutan bangunan rumah th 2018} &= \text{Rp}389.421,25 \times 12 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp}4.673.055 \end{aligned}$$

*Adjustment* :

Beban penyusutan gedung dan bangunan                      Rp4.673.055

    Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan                      Rp4.673.055

### 3. Penyusutan Jalan dan Jaringan

Diasumsikan pada tanggal 14 februari 2018 dilakukan semenisasi dusun

IV RT.01 RW 01 dengan harga perolehan sebesar Rp82.152.200

$$\text{Penyusutan/tahun} = \frac{\text{Rp}82.152.200}{20} = \text{Rp}4.107.610$$

$$\text{Penyusutan/bln} = \frac{\text{Rp}4.107.610}{11} = \text{Rp}373.419,09$$

Jadi penyusutan jalan dan jaringan semenisasi RT.01 RW.01

$$\text{th 2018} = \text{Rp}373.419,09 \times 11 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp}4.107.609,99$$

*Adjustment :*

Beban penyusutan jalan dan jaringan Rp4.107.609,99

Akumulasi penyusutan jalan dan jaringan Rp4.107.609,99

### 4. Tahap Pelaporan

#### a) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

##### Desa

Disajikan informasi realisasi pendapatan, biaya, transfer, surplus/defisit serta pendanaan dari pemerintah desa yang satu persatu dibandingkan dengan anggarannya yang sama dengan APBDesa dalam periode tahun anggaran. Desa Tambang dalam menyajikan Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP (2015) dapat dilihat pada lampiran 2.

### **b) Laporan Kekayaan Milik Desa**

Laporan kekayaan milik desa adalah bentuk pertanggungjawaban yang dibuat untuk pemerintah daerah dan pusat. Laporan kekayaan milik desa menyajikan informasi tentang total kekayaan bersih desa selama satu periode anggaran.

Pada laporan kekayaan milik desa tahun 2018 untuk nilai aset tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 bersaldo Rp. 0 sehingga mengakibatkan tidak adanya perbandingan antara nilai aset tahun berjalan dengan nilai aset tahun sebelumnya.

Dilakukan pembelian persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 8.726.390 oleh Desa Tambang pada tahun 2018. Tapi dilaporan kekayaan milik desa tahun 2018 dibagian persediaan ATK bersaldo Rp.0. Sedangkan setelah di teliti ternyata alat tulis kantor itu telah habis terpakai untuk tahun 2018 sebesar 8.726.390. Akibat dari tidak dibuatnya penyesuaian persediaan, sehingga nilai yang disajikan di laporan kekayaan milik desa tidak sesuai dengan nilai sesungguhnya yang seharusnya dilaporkan.

Aset tetap yang diperoleh ditahun sebelumnya dan tahun berjalan tidak diakumulasikan nilainya di Laporan kekayaan milik desa tahun berjalan. Tidak dihitung & disajikannya nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang dimiliki desa di laporan kekayaan milik desa. Akibat dari tidak dibuatnya penyesuaian terhadap aset tetap maka nilai aset yang tercatat di laporan kekayaan milik desa menjadi lebih tinggi dari seharusnya.

Dibawah adalah cara mengakumulasikan nilai aset tetap tahun lalu dengan tahun sekarang dan perhitungan sebenarnya yang dilakukan oleh desa tambang tentang akumulasi penyusutan aset tetap desa tambang.

**Tabel IV.6**

**Aset Tetap Yang perlu dilaporkan di Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018**

Aset Tetap	Tahun 2017	Tahun 2018	Jmlh Aset Tetap Yg Seharusnya Dilaporkan di Tahun 2018
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	43.215.000	71.338.536	114.553.536
Gedung dan Bangunan	130.085.000	69.098.550	199.183.550
Jalan dan Jaringan	201.532.000	352.806.300	554.338.300
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>374.832.000</b>	<b>493.243.386</b>	<b>868.075.386</b>

Berdasarkan penjabaran tersebut, laporan kekayaan milik desa yang dimiliki desa semestinya disajikan oleh Desa Tambang seperti berikut :

**Tabel IV.7**

**Pemerintah Desa Tambang  
Laporan Kekayaan Milik Desa  
Sampai dengan 31 Desember 2018**

KODE	URAIAN	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
1	2	3	4
1.	<b>ASET</b>		
1.1.	<b>Aset lancar</b>		
1.1.1.	<b>Kas dan Bank</b>	<b>85.107.008</b>	<b>5.391.300</b>
1.1.1.01.	Kas dibendahara desa	1.315.174	58.800
1.1.1.02.	Rekening kas desa	83.791.834	5.332.500
1.1.2	<b>Piutang</b>		

1.1.2.	Piutang panjar kegiatan	0	0
1.1.3	<b>Persediaan</b>	<b>8.726.390</b>	<b>0</b>
1.1.3.02	Persediaan alat tulis kantor	8.726.390	0
	<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>93.833.398</b>	<b>5.391.300</b>
1.2.	<b>Investasi</b>		100.000.000
1.2.1	Penyertaan modal pemerintah desa	0	100.000.000
	<b>Jumlah investasi</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>
1.3.	<b>Aset Tetap</b>		
1.3.1	Tanah	0	0
1.3.2	Peralatan dan mesin	71.338.536	43.215.000
	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(14.267.707)	(8.643.000)
1.3.3	Gedung dan bangunan	69.098.550	130.085.000
	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(6.909.855)	(13.008.500)
1.3.4	Jalan dan Jaringan	352.806.300	201.532.000
	Akumulasi penyusutan jalan dan jaringan	(17.640.315)	(10.076.600)
1.3.5	Aset tetap lainnya	0	0
1.3.6	Kontruksi dalam pengerjaan	0	0
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>454.425.509</b>	<b>343.103.900</b>
1.4.	<b>Dana cadangan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5	<b>Aset tidak lanvar lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>548.258.907</b>	<b>348.495.200</b>
	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kewajiban jangka pendek	0	0
	<b>Jumlah kewajiban jangka pendek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		
3.	<b>EKUITAS</b>		
3.1	<b>Ekuitas</b>		
3.1.1	Ekuitas	<b>454.425.5099</b>	<b>343.103.900</b>
3.1.2	Ekuitas SAL	<b>93.833.398</b>	<b>5.391.300</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>548.258.907</b>	<b>348.495.200</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>548.258.907</b>	<b>348.495.200</b>

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada hasil penelitian yang dijabarkan di bab IV sebelumnya, penulis membuat simpulan dan saran, yaitu :

#### 5.1 Simpulan

1. Siklus akuntansi yang diterapkan desa tambang yaitu ada 4 tahap berawal dari tahap pencatatan yang dicantumkan kedalam Buku Kas Umum, buku bank desa, buku kas pembantu kegiatan dan buku kas pembantu pajak. Kemudian tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran dan tahap akhir yaitu tahap pelaporan yaitu laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan kekayaan milik desa.
2. Ditahap pencatatan yang dilaksanakan desa tambang telah sesuai dengan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa. Tahap penggolongan yang dilaksanakan oleh desa tambang belum sesuai dengan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dan prinsip akuntansi berterima umum yakni tidak mencatat buku besar dengan benar yang sesuai dengan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa. Pada tahap pengikhtisaran, desa tambang tidak menyusun neraca saldo dan kertas kerja, tidak melakukan penyesuaian untuk bahan yang sudah habis pakai dan juga aset tetap yang dimiliki oleh desa.
3. Desa tambang tidak melakukan penyajian pada nilai persediaan akhir alat tulis kantor atas laporan kekayaan milik desa tahun 2018.

4. Desa tambang tidak menghitung nilai depresiasi atas aktiva tetap dan tidak mengakumulasikan nilai aset tetap yang sebelumnya.
5. Desa tambang hanya menyajikan laporan kekayaan milik desa untuk satu periode saja.

## 5.2 Saran

1. Sebaiknya Desa Tambang dalam mengelola keuangan desa menerapkan sesuai pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum sehingga laporan keuangan desa yang dihasilkan benar.
2. Pada tahap penggolongan sebaiknya Desa Tambang melakukan pencatatan dan penggolongan pada buku besar dengan menghitung jumlah saldo pada setiap akun pemasukan serta pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Dengan begitu akan mengetahui saldo akhir per masing-masing akunya. Sebaiknya Desa Tambang membuat neraca saldo untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan,.
3. Sebaiknya desa tambang menyajikan nilai akhir pesediaan alat tulis kantor dilaporan kekayaan milik desa tahun berjalan.
4. Juga sebaiknya Desa Tambang melakukan perhitungan penyusutan aset tetap, dan melakukan pengakumulasian terhadap nilai aset tetap yang dipunyai oleh desa tahun sebelumnya di laporan kekayaan milik desa tahun berjalan serta menyajikannya.

5. Desa Tambang sebaiknya menyajikan laporan kekayaan milik desa tahun sebelumnya sebagai pembandingan tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang di laporan kekayaan milik desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, et al, 2010. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 1, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Nordiawan Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rosalinda Okta, 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Sadeli, Lili, 2015. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi Pertama, Jakarta: Bumi Aksara
- Samryn, L.M. 2011. *Pengantar Akuntansi*. Edisi IFRS. Rajawali Pers. Jakarta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Warren, S. Carl., James M. Reeve dan Philip E. Fess, 2014. *Pengantar Akuntansi, Edisi 25*, Jakarta : Salemba Empat
- Warren, Carl S., Reeve, James M., Duchac, Jonathan E. (2011). *Principles of Accounting (24th edition)*. South Western: Cengage Learning.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Tentang Akuntansi Persediaan
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**